

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PRASARANA SUMBER DAYA AIR SECARA TERPADU MELALUI PROGRAM 942 DI JAKARTA TIMUR

Din El Hakim Malik¹, Abdul Rahman, S.AP., M.A.²

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

e-mail: email: gamingdinel2@gmail.com¹, abdul.rahman27316@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu Melalui Program 942 di Jakarta Timur. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada Biro pembangunan dan lingkungan hidup (Subag. Bagian Sumber Daya Air), Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Bappeda DKI Jakarta, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi DKI Jakarta), dan masyarakat di daerah Tipala Jakarta Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan yang terpengaruhi, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan atau letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang dikerahkan, kekuasaan dan kepentingan strategi aktor yang terlibat, karakteristik Lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap pelaksana program. Kesimpulan dari masing – masing indikator diatas yaitu kebijakan pembangunan program 942 ini, belum cukup efektif. Karena adanya kasus atau permasalahan yang timbul pada program 942, membuat program 942 tidak berjalan dengan yang diinginkan baik masyarakat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan Pembangunan, Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu.*

IMPLEMENTATION DEVELOPMENT AND REVITALIZATION POLICY INFRASTRUCTURE SOURCE TOTAL WATER POWER INTEGRATED THROUGH THE 942 PROGRAM IN EAST JAKARTA

Abstract

This research aims to determine the implementation of the Integrated Water Resources Infrastructure Development and Revitalization Policy through the 942 Program in East Jakarta. This research is included in the type of qualitative research. The data collection method used is a descriptive method with a qualitative approach. The techniques used are observation, interviews, and documentation with the Development and Environment Bureau (Water Resources Subdivision), DKI Jakarta Water Resources Service, DKI Jakarta Bappeda, Indonesian Forum for the Environment (Walhi DKI Jakarta), and local communities. Tipala, East Jakarta. The results of this research show that the interests affected, the type of benefits that will be generated, the degree of change desired, the position of the policy maker or location of decision making, program implementation, resources mobilized, power and strategic interests of the actors involved, characteristics of institutions and authorities, compliance and the responsiveness of program implementers. The conclusion from each of the indicators above is that the 942 program development policy is not effective enough. Due to cases or problems arising from the 942 program, the 942 program did not run as desired by both the community and the DKI Jakarta Provincial Government.

Keywords: *Implementation of Development Policy, Revitalization of Integrated Water Resources Infrastructure.*

PENDAHULUAN

Statistik Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) menunjukkan bencana alam di Indonesia, seperti bencana banjir cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh faktor letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga pertemuan lempeng, yaitu lempeng Indonesia - Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Pemprov DKI Jakarta mencatat jumlah banjir dari tahun 2020 hingga 2021, per 20 Februari 2021: 337, dan 226 banjir, dan banjir disebabkan oleh tiga faktor, diantaranya kondisi cuaca ekstrim, kurangnya tutupan pohon, dan topografi saluran air. Bencana ini tidak dapat dihindari, namun dapat dilakukan upaya pencegahan dan antisipasi untuk meminimalisir dampak yang

ditimbulkan. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan informasi daerah rawan banjir agar dapat dilakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan. (Islamy et al., 2022) Beberapa data statistik dapat menggambarkan persoalan perkotaan yang dihadapi Indonesia. Secara global, Indonesia adalah negara terpadat keempat, dengan 56 persen penduduk tinggal di daerah perkotaan dan tingkat pertumbuhan 2,7 persen per tahun. Hingga 3,9 juta rumah tangga perkotaan tinggal di rumah yang sempit dan berukuran kecil (overcrowded), sebagian besar berada di wilayah metropolitan, terutama di Pulau Jawa. (Na'im & Sukada, 2022).

Karena suatu wilayah yang mempunyai dataran rendah dan sedikitnya wilayah resapan air akan menyebabkan banjir yang terjadi di 13 sungai, wilayah dataran rendah dan minimnya wilayah resapan air yang memiliki 50% area pertumbuhan dan pengembangan menyebabkan luapan air sungai yang menimbulkan masalah banjir. Masalah banjir ini semakin besar dan meningkat dengan kecepatan pertumbuhan penduduk dan adanya perluasan lahan pada wilayah pesisir yang mengakibatkan perubahan pada tingkatan keberhasilan dalam penanggulangan suatu bencana dapat tercapai dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah, tetapi setiap pihak harus memahami hak, kompetensi dan kewajiban mereka dalam administrasi penanggulangan bencana. pada bulan April sampai dengan bulan Juni mengalami penurunan jumlah kasus banjir yang cukup signifikan dibandingkan bulan Januari sampai dengan Maret. Kasus banjir pada wilayah Jakarta Utara di bulan Maret sampai dengan bulan Mei masih stabil dan melonjak kembali kasus banjirnya di bulan Juni dengan wilayah (RW) yang terdampak sebesar 15 RW dan 320 Jiwa, sedangkan daerah Jakarta Barat pada bulan April mengalami ketidakstabilan dengan bencana banjir dan mengalami penurunan kasus bencana banjir tersebut pada bulan Mei sampai dengan Juni, sedangkan daerah Jakarta Selatan wilayah (RW) yang terdampak sebanyak 44 RW dan 10 jiwa di bulan April, mengalami penurunan kembali di bulan Mei dengan wilayah (RW) yang terdampak sebanyak 15 RW dan tidak ada pengungsian dan bulan Juni pun mengalami kestabilan. Jakarta Timur pun mengalami kasus banjir yang sama pada bulan April dengan wilayah (RW) yang terdampak sebanyak 39 RW dan tidak ada pengungsian karena tinggi muka air stabil, sedangkan di bulan Mei mengalami lonjakan dengan wilayah (RW) sebanyak 30 RW dan 213 Jiwa yang terdampak banjir, pada bulan Juni mengalami kestabilan kembali. Pada wilayah kepulauan Seribu pun pada bulan April sampai dengan bulan Mei tidak mengalami kasus bencana banjir akan tetapi di bulan Juni mengalami banjir dengan Wilayah (Rw) yang terdampak 21 Rw dan tidak adanya pengungsian dan Jakarta Timur mempunyai kasus banjir yang setiap bulannya kurang stabil dibandingkan wilayah lainnya. (Kusuma et al., 2022).

Berdasarkan informasi yang diambil melalui situs kontan.co.id yang diakses pada 30 Oktober 2022, terungkap anggaran pembangunan Kanal Sungai Ciliwung hingga kanal banjir timur sebesar 1,2 triliun untuk periode tahun 2013-2014. Implementasi kebijakan penanggulangan banjir di DKI Jakarta seharusnya sudah baik, namun pada kenyataannya implementasi kebijakan tersebut tidak dilaksanakan dengan optimal. Grindel (1980:10) juga menunjukkan perlunya implementasi politik yang membutuhkan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi politik, yaitu hubungan segitiga variabel politik, organisasi, dan sistem operasi, Pemerintah DKI Jakarta berupaya mengatasi banjir yang melanda wilayah DKI Jakarta setiap tahunnya. Intensitas curah hujan yang tinggi di bagian hulu (Jawa Barat

dan Banten) menyebabkan kelebihan kapasitas aliran di Jakarta yang mengalirkannya ke sungai sebelum dibuang ke laut. Ada masalah yang menyebabkan sungai di muara di wilayah Jakarta meluap sehingga menimbulkan bencana banjir Program Pengendalian Banjir 942 merupakan salah satu program kerja Pemerintah DKI Jakarta yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan banjir, Program ini dilaksanakan pada tahun 2021 – 2022 dan direncanakan selesai pada tahun 2022, akan tetapi permasalahan timbul karena adanya kendala terkait pengadaan pompa pada beberapa wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah Jakarta Timur yang merupakan salah satu wilayah dengan kasus tertinggi pada bulan Januari s.d. Maret 2020, Permasalahan banjir pada wilayah Jakarta Timur semakin diperparah dengan pertumbuhan pemukiman padat disertai penurunan kapasitas saluran aliran air yang disebabkan oleh sistem drainase yang tidak memadai sehingga menyebabkan kelebihan aliran air dan mengakibatkan banjir. (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Penelitian ini akan mengulas permasalahan yang timbul dari penerapan kebijakan 942, Pada penelitian ini juga akan dibahas terkait realisasi program di lapangan dan perencanaan awal kebijakan. Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu Melalui Program 942 di Jakarta Timur”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bermaksud untuk mengetahui serta penyelesaian dalam permasalahan penelitian dengan mendeskripsikan, mengelaborasi dan menggambarkan dalam suatu keadaan yang sesuai dengan kenyataan yang telah ditemukan di lapangan dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara terpadu melalui Program 942 di Jakarta Timur dalam memecahkan permasalahan bencana banjir di DKI Jakarta. Kebijakan dalam permasalahan tersebut diambil berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air secara terpadu melalui program 942 di Jakarta Timur, maka ditemukan hal sebagai berikut:

Kepentingan yang Terpengaruhi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, menyatakan bahwa penelitian ini pada indikator kepentingan yang terpengaruhi dalam program 942 yaitu dengan melihat sejauh mana pembangunan infrastruktur pada program 942 yang sudah terlaksana dan sudah berfungsi pada pengendalian banjir. Menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Pasal 5 tentang kebijakan umum dan kriteria penentuan lokasi pada kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dilakukan Dinas sumber daya air dan Suku dinas sumber daya air Jakarta Timur, dinilai belum efektif. Karena ditemukan adanya salah satu pengaruh dari kasus pembebasan lahan yang berada di Pondok Rangun, namun pemerintah telah melakukan pembebasan lahan untuk proyek penanganan banjir, tetapi ada kasus yang diduga melibatkan pelanggaran administrasi, yang mana Dinas Sumber Daya Air dan Biro pembangunan lingkungan hidup mengeluarkan kebijakan pembangunan 942 ini untuk meminimalisirkan bencana banjir yang selalu melanda DKI Jakarta setiap musim penghujan khususnya Jakarta Timur. pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran administrasi tersebut, guna memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proyek penanganan banjir serta pembebasan lahan yang berkaitan. Selain itu, perlu ditingkatkan tata kelola yang baik dan pengawasan ketat terhadap proses pembebasan lahan dan proyek infrastruktur guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Jenis Manfaat Yang Akan Dihasilkan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, menyatakan bahwa penelitian ini pada indikator jenis manfaat yang akan dihasilkan pada kebijakan pembangunan program 942 adalah manfaat yang akan dihasilkan dari pentingnya mempertimbangkan aspek ekologi dalam proyek-proyek pengendalian banjir adalah untuk memastikan bahwa lingkungan alamiah tetap terjaga dan bahkan ditingkatkan. Menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta

Nomor 31 Pasal 7 tentang kebijakan umum dan kriteria penentuan lokasi terkait manfaat yang akan dihasilkan pada pembangunan waduk/embung yang telah terbagun, dinilai cukup efektif. Namun ada beberapa kekurangannya, wilayah resapan air hujan yang kurang, disini Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta memperhatikan kapasitas tampungan waduk dan embung, seperti waduk Pondok Rangon dan embung Wirajasa. Namun, pembangunan tersebut belum sepenuhnya selesai, dan ada beberapa pembangunan yang masih dalam tahap pengerjaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat pembangunan tersebut agar dapat berfungsi dengan semestinya, masyarakat juga bisa berperan dalam pemantauan dan pelaporan terkait banjir, sehingga dapat membantu dalam tindakan cepat jika diperlukan ketika banjir melanda wilayah tersebut.

Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, menyatakan bahwa penelitian ini pada indikator derajat perubahan yang diinginkan yaitu dengan perubahan yang diinginkan pada Peraturan gubernur DKI Jakarta Pasal 12 ayat 2 tentang pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penanganan bersama oleh berbagai pihak, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Namun pembangunan di wilayah Jakarta Timur mengenai program 942 ini, belum banyak menghasilkan perubahan, karena nyatanya wilayah Jakarta Timur masih terjadi banjir. Dalam menjalankan upaya pengendalian banjir, pemantauan proyek, keterlibatan masyarakat, sosialisasi solusi, dan penerapan prinsip keadilan menjadi hal-hal yang sangat penting. Semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi seluruh komunitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi, perbaikan, dan pemantauan yang cermat agar pembangunan infrastruktur air selesai sesuai target dan dengan kualitas yang baik. Dalam konteks konsep naturalisasi, penting juga untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam proses pembangunan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan alam dan ekosistem.

Kedudukan Pembuat Kebijakan/ Letak Pengambilan Keputusan Pada Program 942

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, menyatakan bahwa penelitian ini pada indikator derajat Kedudukan Pembuat Kebijakan/ Letak Pengambilan Keputusan Pada Program 942 adalah kebijakan pengendalian banjir dan pengelolaan sumber daya air harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan lingkungan serta melibatkan partisipasi masyarakat. Pengambilan keputusan harus sesuai dengan tingkat tanggung jawab instansi terkait, dan pengelolaan kapasitas tampungan air harus bijaksana. Menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Pasal 12 Ayat 3 tentang Penanganan bersama oleh berbagai pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sinergi antara program Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pemangku kepentingan, dalam membuat kebijakan belum dapat dinyatakan efektif, karena adanya miskomunikasi antara pembuat kebijakan (Biro Pembangunan dan lingkungan Hidup dan Subag. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan banjir dapat mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap proyek pembangunan. Prinsip keadilan harus menjadi pertimbangan penting dalam pembangunan program, seperti Program 942. Isu kapasitas tampungan banjir dan pengawasan serta evaluasi yang cermat menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sistem pengendalian banjir.

Pelaksana Program

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, menyatakan bahwa penelitian ini pada indikator pelaksanaan program 942 yaitu orang-orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program

942 dalam pengendalian banjir di Jakarta Timur, mengenai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Pasal 11 Ayat 2 tentang rencana Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Sumber Daya Air dengan memperhatikan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, terkait Kebijakan Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air melalui Program 942 DI Jakarta Timur. Program 942 juga berfokus pada mengembalikan ekosistem pada prasarana sumber daya air yang terganggu. Namun dalam pelaksanaan program ini sudah cukup efektif, hanya saja pembangunan yang belum selesai, segera di selesaikan dengan baik. Monitoring dan evaluasi program 942 dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk biro pembangunan dan lingkungan hidup, PWC, dan inspektorat. Evaluasi melibatkan pemantauan dampak banjir di wilayah yang telah dibangun dan berfokus pada pemenuhan tujuan program. Selain itu, program 942 juga mempertimbangkan opsi pembiayaan melalui pinjaman, namun keputusan untuk menggunakan opsi ini harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar memastikan potensi pendapatan, kemampuan pengembalian, dan keberlanjutan keuangan proyek. Melalui partisipasi masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Hal ini juga membantu mencegah konflik dan memastikan dukungan yang lebih luas dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Sumber Daya Yang Dikerahkan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, menyatakan bahwa penelitian ini pada indikator sumber daya yang dikerahkan, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Pasal 18 Ayat 1 tentang peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk ikut meningkatkan kualitas lingkungan pada Prasarana Sumber Daya Air secara berkelanjutan melalui dukungan Pemerintah Daerah, untuk pelaksanaan Program 942 agar berjalan dengan baik. Tetapi beberapa pendapat masyarakat merasa tidak ikut terlibat dalam pembangunan Program 942 ini, jadi belum efektif. Program ini bertujuan mengendalikan banjir dan mengelola air bersih dengan baik di Jakarta. Peran sumber daya manusia yang berkualitas dan sistem yang baik dalam melaksanakan program naturalisasi konservasi sungai untuk efektivitas pembangunan. Upaya kolaboratif dan komprehensif yang melibatkan semua pihak sangat penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan pengendalian banjir serta menjaga kualitas hidup masyarakat.

Kekuasaan, Kepentingan Strategi Aktor Yang Terlibat

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, menyatakan bahwa penelitian ini pada indikator kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang mereka inginkan, dalam pengendalian banjir melalui Program 942, menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Pasal 1 ayat 3 tentang Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk memperlancar jalannya kebijakan pembangunan dari program 942. Namun dilihat dari hasil wawancara bahwa eksekutor selain Gubernur DKI Jakarta, ada instansi Lembaga lain yang turut membantu dalam memperlancar jalannya pembangunan Program 942 seperti Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Subag. Bagian Sumber Daya Air), Dinas Sumber Daya Air, Bappeda dan sebagainya. kemampuan pemerintah dan kelompok terlibat dalam pengendalian banjir melalui Program 942 ini sudah cukup efektif. Dalam melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat, dengan tujuan utama untuk melibatkan masyarakat dalam upaya penanganan banjir. Pemantauan pelaksanaan program, terutama dalam aspek pembangunan dan lingkungan hidup, sangat penting. Pemantauan yang efektif dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proyek-proyek pengendalian banjir terus berjalan dan mencapai hasil yang diharapkan. Maka dari itu pemerintahan DKI Jakarta khususnya Suku Dinas wilayah Jakarta Timur, seharusnya mengadakan Kembali sosialisasi terkait program 942 ini supaya masyarakat memahami fungsi

dari program 942 ini. Integrasi konsep, dan kebijakan yang lebih efektif adalah hal-hal yang perlu menjadi perhatian utama dalam upaya pengendalian banjir di Jakarta.

Karakteristik Lembaga Dan Penguasa

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, menyatakan bahwa penelitian ini pada indikator karakteristik Lembaga dan Penguasa adalah kapasitas lembaga mengacu pada kemampuan lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya pada kebijakan pembangunan program 942, menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Pasal 1 Ayat 7 tentang Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Karena Dinas Sumber Daya Air merupakan Lembaga yang langsung turun kelapangan pembangunan program 942 ini, namun disini belum efektif. Karena ada kekurangan pada pembangunan program 942 terkait waktu yang sudah ditentukan. Selain itu, sosialisasi dan partisipasi masyarakat juga penting untuk menjaga dan mengoptimalkan hasil dari proyek-proyek tersebut. Pemerintah DKI Jakarta telah mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dan ekologis dalam pembangunan, dan proses monitoring serta evaluasi rutin dilakukan untuk memantau pelaksanaan program-program tersebut. Walhi juga mencatat bahwa dampak banjir terus meningkat, menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengendalian banjir, namun program 942 ini belum sepenuhnya selesai, tetapi Sebagian besar seperti waduk sudah dibuka secara umum dan aktifitas masyarakat sudah menggunakan pembangunan tersebut sebagai area berdagang maupun jogging track bagi masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, upaya pencegahan banjir, perbaikan kualitas air, dan pendekatan berkelanjutan dalam pengendalian banjir harus menjadi fokus utama dalam mengatasi masalah banjir di Jakarta.

Kepatuhan Dan Daya Tanggap Pelaksana Program

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, menyatakan bahwa penelitian ini pada indikator kepatuhan dan Daya Tanggap dari pemerintahan adalah bagaimana pemerintah merespons masukan dan keluhan dari masyarakat terkait dengan pembangunan dan pengoperasian, menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Pasal 6 tentang Kebijakan umum Pembangunan dan Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan, seperti apa daya tanggap atau respon pemerintah dan Lembaga dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat dan terselesaikan atau tidaknya. Namun daya tanggap atau respon pemerintah masih kurang merespon atau lambat dalam menangani keluhan – keluhan dari masyarakat terkait banjir ini dan masih perlu

ditingkatkan. tetapi respons pemerintah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal respons yang lebih cepat dan penanganan akar masalah banjir di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta atau Instansi terkait, daya tanggap atau respon pemerintah masih kurang merespon atau lambat dalam menangani keluhan – keluhan dari masyarakat terkait banjir ini, adapun menurut salah satu perwakilan walhi meanggapi bahwa pemerintah mungkin tidak secara efektif mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat terkait Program 942, dan ada keraguan bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan atau merespons masalah-masalah yang diajukan oleh masyarakat yang terdampak.

KESIMPULAN

Program 942 bertujuan untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta, terutama di Jakarta Timur, belum berhasil berjalan dengan efektif. Salah satu kendala utamanya adalah permasalahan dalam pembebasan lahan yang diduga melanggar administrasi. Meski begitu, program ini memiliki manfaat yang dianggap cukup efektif dalam mengendalikan banjir, seperti menjaga dan meningkatkan ekosistem alamiah, mendukung ekosistem air tawar. Meskipun terdapat upaya untuk melakukan perubahan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air di wilayah Jakarta Timur, implementasi program 942 dan sinergi antara berbagai pihak dalam membuat kebijakan masih belum efektif.

Adapun kendala seperti penundaan dalam pembangunan rumah pompa Tipala dan masalah pembangunan JGC yang menyebabkan pembangunan yang tidak selesai tepat waktu. Diperlukan perbaikan dalam pemantauan yang lebih komprehensif dan konsistensi dalam mengikuti rekomendasi teknis dari

berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan program ini. Program 942 yang bertujuan untuk mengendalikan banjir dan mengelola air bersih di Jakarta memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan kerjasama yang komprehensif dari berbagai pihak. Meskipun terdapat beberapa upaya untuk melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan, implementasi program ini masih menghadapi kendala dalam melibatkan masyarakat secara efektif.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah melakukan evaluasi terhadap permasalahan ganti rugi pembebasan lahan warga yang diduga melanggar administrasi serta melakukan koordinasi terkait proses pembangunan yang tertunda. Diharapkan dengan saran tersebut program 942 dapat terlaksana dengan baik dan berfungsi sebagai infrastruktur pencegahan banjir di wilayah Jakarta Timur. Koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air, dan peran aktif masyarakat diperlukan agar tidak terjadi permasalahan baru pada kebijakan pembangunan pada program 942 dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik Dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan Implementation Of Public Policy From The Monitoring Perspective. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 98-105.
- Agus Taryana, Dkk. (2022). Analisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir Di Jakarta. *Jurnal Administrasi Negara*, 302 - 311.
- Balqis, G. E., Rifai, M., & Santoso, M. P. T. (2021). Efektivitas Program Destana Oleh Bpbd Provinsi Dki Jakarta Di Kelurahan Cililitan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1120-1128.
- BNPB. (2021). Panduan edukasi bencana banjir.
- Dumaris, M. (2022). Implementasi Program Kampung Siaga Bencana Dalam Bencana Banjir Di Kelurahan Kampung Melayu Kota Jakarta Timur (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Fadhilla, M. S., & Sudinda, T. W. (2022, August). Analisis Desain Kapasitas Sistem Instalasi Penyaluran Air Limbah Domestik Akibat Pertumbuhan Penduduk:(Studi Kasus: Permukiman Dahlia, Jakarta Timur). In *Prosiding Seminar Intelektual Muda* (Vol. 3, No. 2, Pp. 52-57).
- Fransiari, E., Warouw, S. P., & Brahmana, N. E. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Di Masyarakat Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 11(2), 201-211.
- Harris Padhilah, Dkk. (2022). Evaluasi Kapasitas Saluran Drainase Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara. *Jurnal Kajian Teknik Sipil*, 34 - 41.
- Islamy, U., Nursidah, D. R., Narendra, I. S., Anshori, M. L., & Widodo, E. Pengelompokan Provinsi Di Indonesia Berdasarkan Indikator Dampak Bencana Banjir Tahun 2017-2020 Menggunakan K-Medoids. *Bimaster: Buletin Ilmiah Matematika, Statistika Dan Terapannya*, 11(02).
- Islamy, U., Nursidah, D. R., Narendra, I. S., Anshori, M. L., & Widodo, E. Pengelompokan Provinsi Di Indonesia Berdasarkan Indikator Dampak Bencana Banjir Tahun 2017-2020 Menggunakan K-Medoids. *Bimaster: Buletin Ilmiah Matematika, Statistika Dan Terapannya*, 11(02).
- Insan Harapan Harahap. (2021). Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dan Dampak Bagi Warga Kota Dki Jakarta. *Journal Of Entrepreneurship, Management, And Industry (Jemi)*, Vol. 4, No. 1, 18-24.
- Joko Pramono. (2020). Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. solo: UNISRI Press.
- Sakethi, T. M. (2010). Pengendalian Banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung.

Peraturan/Undang-Undang :

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

Artikel :

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup DKI Jakarta (2022). Index Pencemaran Air
<https://ppkl.menlhk.go.id/website/index.php?q=1090&s=befa2b19820da7401dbf672069d4af99a040c200> -
diakses pada 08 Mei 2023

Singgih Wiryono. (2022). Pemprov DKI Punya Program 942 Project untuk Meminimalisasi Banjir Besar.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/08/18445031/pemprov-dki-punya-program-942-project-untuk-minimalisasi-banjir-besar-apa?page=all#page2> - diakses pada 22 November 2022